

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : ANGGITA SARI LUBIS
NPM : 1405170631
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : ANGGITA SARI LUBIS
NPM : 1405170631
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Diyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(PREKA NURMALA SARI, SE., M.SIAK)

PENGUJI II

(SUKMA LESMANA, SE., MSI)

Pembimbing

(SEPRIDA HANUM HARAHAHAP, SE, SS, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua



(H. TANURI, SE, MM M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ANGGITA SARI LUBIS
NPM : 1405170631
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing

SEPRIDA HANUM HARAHAHAP, SE, SS, MSi

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, MSI

NAMA MAHASISWA : ANGGITA SARI LUBIS
NPM : 1405170631
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN
JUDUL PROPOSAL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/3 2018	cek kembali Bab 1 & Bab 2 - Latar Belakang Masalah - Rumusan Masalah - Tujuan & Manfaat Penelitian		
11/3 2018	cek kembali Bab 1, teori dan Jurnal cek kembali kerangka konseptual cek Bab 11		
12/3 2018	Perbaiki Bab 11 Deskripsi Data		

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, MSI

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, MSI

NAMA MAHASISWA : ANGGITA SARI LUBIS
NPM : 1405170631
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN
JUDUL PROPOSAL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19/3/2018	Faktor kesiapan pemerintah Perbaiki		
20/3/2018	perbaiki pembahasan dan kesimpulan daftar pustaka - a gambar - a tabel - abstrak - kata pengantar		
22/3/2018	Selesai bimbingan Ace siap sidang		

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, MSI

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ANGGITA SARI LUBIS
NPM : 1405170631
Konsentrasi : MANAJEMEN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan, Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 20 Maret 2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANGGITA SARI LUBIS, NPM 1405170631, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI, untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI, untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI, Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dengan pendekatan penelitian menggunakan asosiatif, dengan jumlah sampel sebanyak 68 pegawai.

Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuisisioner yang diproses dan dianalisis dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI dilihat dari nilai *R-square* sebesar 0,765 atau 76,5% sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Variabel sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI dilihat dari nilai hasil $t_{hitung}(6,083) > t_{tabel}(1,996)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan variabel komitmen organisasi secara parsial berpengaruh dilihat dari $t_{hitung}(1,340) < t_{tabel}(1,996)$ dengan nilai signifikan $0,002 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan teknologi informasi berpengaruh $t_{hitung}(0,995) < t_{tabel}(1,996)$ dengan nilai signifikan $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kemampuan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda terhormat **Aminurrasyid Lubis** dan Ibunda **Intan Sitorus**, serta pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Dr.H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H.Januri SE.,MM M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Seprida Hanum Harahap, SE,SS,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
7. Bapak Ir. Irwan Ritonga, M.si Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
8. Bapak Ir Sulfan Nasution selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
9. Bapak Arfan Anshari Rangkuti, SE selaku Instuktur penulis selama diBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang telah memberikan masukan kepada penulis.
10. Teman Seperjuangan Saya Desy Annisa Bangun, Indri Afsari, Try Asti, Intan Elmira Siregar, Asriana Hutahaeen, dan teman-teman khususnya kelas G Akuntansi Pagi stambuk 2014 semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Rizky Ramadhan, Windri Aderini yang telah menghibur dan menyemangati penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Medan, Maret2018

ANGGITA SARI LUBI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Magang	1
B. Ruang Lingkup Magang	2
C. Tujuan dan Manfaat Magang	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan	6
B. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas	16
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	
A. Bentuk Kegiatan Magang	25
B. Prosedur Kerja	26
C. Kendala yang Dihadapi	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia. Sejak 22 Oktober 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama.

Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan memberikan

pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan, 2015). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengenai tata cara pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. SAP mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*), artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Perubahan ini pasti akan memberikantantangan bagi pemerintah di Kota Medan khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk mengaplikasikannya apalagi dalam praktiknya pengelolaan keuangan yang digunakan sejak dahulu adalah *single entry*. SAP mengisyaratkan pencatatan *double entry* yang jelas jauh berbeda dengan *single entry*. Selain itu SAP secara bertahap akan berubah dari *cash toward accrual* (PP 24 tahun 2005) ke *full accrual* (PP 71 tahun 2010).

Penerapan SAP Berbasis AkruaI bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Implementasi harus dilaksanakan secara hati-hati dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem dan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI sangat diperlukan agar pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak. Davis (2010) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi sumber daya manusia, komitmen, dan perangkat pendukung.

Hal menonjol yang terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Walaupun sudah diterapkan dari tahun 2015 nyatanya pemerintah

khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan belum sepenuhnya memperhatikan faktor pendukung dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini.

Permasalahannya yaitu dalam hal ini pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Medan belum memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia, dilihat dari tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ini dibuktikan dengan teori Enho (2008) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yaitu PP No 24 Tahun 2005. Mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP), hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi pemerintah karna ternyata SDM yang mereka miliki bahkan belum memahami SAP berbasis kas apalagi untuk memahami SAP berbasis akrual. Menurut Wibowo (2007) Kompetensi diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Kusnanto (2007) Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini sumber daya manusia meliputi pengetahuan dibidang akuntansi pemerintahan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah terhadap penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya.

Selanjutnya Komitmen Organisasi, Sulani (2010) menyatakan komitmen dari anggota organisasi akan mempercepat keberhasilan penerapan peraturan

tersebut, selain itu dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan pemerintah. Permasalahannya yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, ditandai dengan masih adanya pegawai yang belum memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Menurut Hendra Poerwanto (2006) dukungan adalah tingkat sejauh mana pimpinan memberi komunikasi dan arahan yang jelas, bantuan serta dukungan dan pelatihan terhadap bawahan mereka dalam menyelesaikan dan memahami suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Lemahnya dukungan yang diberikan ditandai dengan kurangnya pelatihan yang diberikan.

Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Kenneth dan Jane (2005) bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif maka diperlukan sarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Permasalahannya adalah belum terintegrasi nya perangkat lunak kepada semua bagiang yang merupakan teknologi informasi pendukung yang akan membantu BPKAD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Menurut Roger (2002) software atau perangkat lunak adalah suatu perintah program didalam sebuah komputer, yang apabila dieksekusi oleh usernya dapat memberikan fungsi dan juga unjuk kerja yang diinginkan oleh usernya, dalam hal ini yaitu sistem yang digunakan didalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena yang permasalahan yang terjadi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan professional dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dibutuhkan pelatihan yang menyeluruh kepada semua pegawai, serta dukungan teknologi informasi seperti perangkat lunak khusus SAP agar penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya uraian diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan kurang memperhatikan kualitas sumber daya manusia, tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi.
2. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai sehingga masih ada pegawai yang kurang memahami dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
3. Teknolgi informasi yang belum terintegrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
3. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
4. Apakah Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sebenarnya dan juga sebagai ajang membandingkan

praktik secara nyata didunia usaha dengan materi yang dipelajari di kuliah.

- b. Manfaat Praktis, dapat memberikan informasi yang berharga bagi pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam hal penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar menjadi lebih baik.
- c. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi pembaca, dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk penelitian lanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia. Sejak 22 Oktober 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama.

Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan memberikan

pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan, 2015). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengenai tata cara pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. SAP mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*), artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Perubahan ini pasti akan memberikantantangan bagi pemerintah di Kota Medan khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk mengaplikasikannya apalagi dalam praktiknya pengelolaan keuangan yang digunakan sejak dahulu adalah *single entry*. SAP mengisyaratkan pencatatan *double entry* yang jelas jauh berbeda dengan *single entry*. Selain itu SAP secara bertahap akan berubah dari *cash toward accrual* (PP 24 tahun 2005) ke *full accrual* (PP 71 tahun 2010).

Penerapan SAP Berbasis AkruaI bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Implementasi harus dilaksanakan secara hati-hati dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem dan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI sangat diperlukan agar pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak. Davis (2010) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi sumber daya manusia, komitmen, dan perangkat pendukung.

Hal menonjol yang terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Walaupun sudah diterapkan dari tahun 2015 nyatanya pemerintah

khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan belum sepenuhnya memperhatikan faktor pendukung dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini.

Permasalahannya yaitu dalam hal ini pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Medan belum memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia, dilihat dari tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ini dibuktikan dengan teori Enho (2008) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yaitu PP No 24 Tahun 2005. Mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP), hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi pemerintah karna ternyata SDM yang mereka miliki bahkan belum memahami SAP berbasis kas apalagi untuk memahami SAP berbasis akrual. Menurut Wibowo (2007) Kompetensi diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Kusnanto (2007) Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini sumber daya manusia meliputi pengetahuan dibidang akuntansi pemerintahan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah terhadap penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya.

Selanjutnya Komitmen Organisasi, Sulani (2010) menyatakan komitmen dari anggota organisasi akan mempercepat keberhasilan penerapan peraturan

tersebut, selain itu dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan pemerintah. Permasalahannya yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, ditandai dengan masih adanya pegawai yang belum memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Menurut Hendra Poerwanto (2006) dukungan adalah tingkat sejauh mana pimpinan memberi komunikasi dan arahan yang jelas, bantuan serta dukungan dan pelatihan terhadap bawahan mereka dalam menyelesaikan dan memahami suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Lemahnya dukungan yang diberikan ditandai dengan kurangnya pelatihan yang diberikan.

Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Kenneth dan Jane (2005) bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif maka diperlukan sarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Permasalahannya adalah belum terintegrasi nya perangkat lunak kepada semua bagiany ang merupakan teknologi informasi pendukung yang akan membantu BPKAD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Menurut Roger (2002) software atau perangkat lunak adalah suatu perintah program didalam sebuah komputer, yang apabila dieksekusi oleh usernya dapat memberikan fungsi dan juga unjuk kerja yang diinginkan oleh usernya, dalam hal ini yaitu sistem yang digunakan didalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena yang permasalahan yang terjadi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan professional dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dibutuhkan pelatihan yang menyeluruh kepada semua pegawai, serta dukungan teknologi informasi seperti perangkat lunak khusus SAP agar penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya uraian diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”**.

F. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

4. Pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan kurang memperhatikan kualitas sumber daya manusia, tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi.
5. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai sehingga masih ada pegawai yang kurang memahami dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
6. Teknolgi informasi yang belum terintegrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

G. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

5. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
6. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
7. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
8. Apakah Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan penerapan Standar Akuntansi Penerapan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?

H. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Dengan tujuan dari penelitian ini adalah :

- e. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- f. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- g. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- h. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- d. Manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sebenarnya dan juga sebagai ajang membandingkan praktik secara nyata didunia usaha dengan materi yang dipelajari di kuliah.

- e. Manfaat Praktis, dapat memberikan informasi yang berharga bagi pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam hal penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar menjadi lebih baik.
- f. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi pembaca, dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk penelitian lanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi dibidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah

daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Dalam menyusun SAP, Komite SAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh:

1. *International Federation of Accountant*
2. *International Accounting Standards Committee*
3. *International Monetary Fund*
4. IAI
5. *Financial Accounting Standards Board*
6. *Governmental Accounting Standards Board*
7. Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku di Republik Indonesia
8. Organisasi profesional lainnya di berbagai Negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

a. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

b. Akuntansi Berbasis Kas dan Berbasis Akrua

1. Akuntansi Berbasis Kas

Basis kas merupakan pencatatan transaksi ekonomi hanya apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas Halim dan Syam (2011:54). Sedangkan menurut Bastian (2009:121) basis kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan.

Lingkup akuntansi berbasis kas meliputi saldo kas dan pengeluaran kas. Lebih lanjut Bastian menjelaskan karakteristik dari basis kas antara lain sebagai berikut :

1. “Mengukur aliran sumber kas.
2. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan.

3. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja (*Spending Limit*) dan pada peraturan lain.
4. Menghasilkan Laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan keputusan".

2. Akuntansi Berbasis Akruwal

Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan Bastian (2009:123). Khan dan Mayes (2009:3) mengartikan :

“Akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi dimana transaksi diakui berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini, maka pendapatan akan diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban akan diakui sebagai utang ketika sumber daya telah digunakan”.

Nurmalia Hasanah (2017) dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan menjelaskan perbandingan PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010 adalah:

“Laporan keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP No 24 tahun 2005) terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Neraca
- 3) Laporan Arus Kas, dan
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan pada SAP baru (PP No 71 tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan realisasi Anggaran (LRA).
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional (LO).
- 5) Laporan Arus Kas (LAK).
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan”.

Masing-masing laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola

oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) , Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA) sehingga tersaji lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.
4. Laporan Operasional yang disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin didalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas, yang disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas, yang disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan yang disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Bambang Widjajarro (2008), akan mencakup hal-hal seperti:

1. “Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
2. Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
4. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Halim dan Kusufi (2013:225), Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum.

Menurut Anggota IKAPI (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.

Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat). Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Kelebihan Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas Mardiasmo (2002). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Menurut Bastian (2006:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut :

“Pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat

ukur modal. Di samping itu, basis akrual digunakan untuk mencatat *revenue* ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan”.

Dari beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi. Jadi basis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi sesuai waktunya sehingga konsep periodisasi dapat terpenuhi.

d. Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Nurmalia Hasanah (2017:15) dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan menyebutkan beberapa kekurangan akuntansi berbasis akrual yaitu :

1. “Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan.
2. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan.
3. Tidak ada perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima”.

e. Penerapan Standar Akuntansi Publik Basis Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan dicetuskannya PP Nomor 71 Tahun 2010, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. Berdasarkan pasal 36, ayat 1 UU Nomor 17 disebutkan : ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. selama pengakuan pendapatan dan belanja

berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Namun karena pemerintah belum sanggup merealisasikan dalam lima tahun pertama, yakni pada tahun 2008, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perpanjangan waktu, yaitu lima tahun lagi hingga tahun 2015, terhitung sejak dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Penerapan akrual basis dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. *Asian Development Bank (ADB)* secara khusus menyoroti masalah penerapan akrual bagi negara berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul "*Accrual Budgeting and Accounting in Government and It's Relevance for Developing Member Countries*" memberikan tujuh rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara berkembang, yaitu sebagai berikut :

1. "Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat dua model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model *big bang* dan model bertahap. Keuntungan pendekatan *big bang* adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan.
2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.
3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup.

Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah.

5. Sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual.
6. Badan *audit* tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan *audit* memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga *audit*.
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) *Hearing*-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009.
- 2) Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2015

Setelah syarat-syarat implementasi terpenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di

pemerintah daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi penerapan basis akrual di pemerintah daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual.
2. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan.
3. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
4. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan *benchmarking*. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah.
5. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan persepsi dan sosialisasi, cara ini dapat digunakan untuk menyerap *input* berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual.

Sedangkan pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak.
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.

3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Dengan adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini serta ditunjang dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka diharapkan pemerintah kita siap mempraktikkan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar, tepat guna dan profesional.

f. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan PP.No.71 Tahun 2010

Armenakis et al dalam Herlina (2013) mendefinisikan kesiapan sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al dalam Herlina (2013) adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh : apa yang sedang berubah), proses (contoh : bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh : keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh : karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima , menyetujui dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo. Teori kesiapan yang dikemukakan oleh Holt et al dalam Herlina (2013) yang dikaitkan kedalam penelitian dapat dilihat dari :

1. Isi (apa yang berubah)

Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP No.24 Tahun 2005) menjadi sistem akrual penuh.

2. Proses (bagaimana perubahan di implementasikan)

Mazmanian dan Sabtier dalam Herlina (2013) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dalam peradilan.

3. Individu

Penilaiannya dapat dilihat dari karakteristik mereka yang diminta untuk berubah, maka kajian mengenai perilaku partisipan penelitian diantaranya yaitu :

a). Komitmen pimpinan, Robbins dalam Herlina (2013) mengemukakan sikap atau perilaku anggota organisasi pada umumnya dipengaruhi pula oleh perilaku pimpinannya.

b). Resistensi terhadap perubahan, adalah kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individu atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional (Yudo dalam Herlina 2013).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007), sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut Sutrisno (2014:34), Sumber daya manusia adalah

“Merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi Sumber Daya Manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa Sumber Daya Manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Semula Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan dari “*human resources*”, namun ada pula ahli yang menyamakan Sumber Daya Manusia dengan “*manpower*” (tenaga kerja)”.

1) Indikator Sumber Daya Manusia meliputi :

a. Kompetensi

Kompetensi menurut Sukrisno Agoes (2012:146) menyebutkan bahwa:

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*Knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Seiring dengan pemahaman manusia, kompetensi harus didukung dengan pengalaman (*experience*), tanggung jawab (*responsibility*) dan keterukuran (*accountability*). Pengalaman adalah sesuatu yang dipernah dialami, sedangkan

tanggung jawab berarti keadaan yang menanggung segala sesuatunya apabila terjadi hal yang tidak diarpakan, kemudia keterukuran adalah keadaan dimana sesuatu diukur dalam satuan tertentu.

b. Integritas

Integritas Menurut Andreas Harefa (2009) ada 3 hal yang selalu diperhatikan dalam integritas yaitu memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten.

c. Loyalitas

Loyalitas menurut Poerwopoespito (2005) mengemukakan bahwa :

loyalitas yaitu pekerjaan yang tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur dalam bekerja, hubungan kerja yang baik dengan atasan, kerja sama yang baik dengan rekan kerja, disiplin, menjaga citra perusahaan dan adanya kesetiaan untuk bekerja dalam waktu yang lebih panjang.

d. Reward

Menurut Simamora (2004:514) penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif.

e. Budaya Organisasi

Menurut Munandar (2005:263) budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.

f. Komitmen Organisasi

Menurut Hennis B. Simandjuntak (2005:1) dalam Azhar (2008) komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan

kepada seseorang. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2007) dalam Aldiani (2009) mendefinisikan komitmen sebagai :

“Suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi sertatujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi tidak ada berhubungan dengan bakat, kemampuan atau kecerdasan, tetapi komitmen berhubungan dengan perasaan memiliki atau cinta terhadap organisasi dan rela mengorbankan keinginan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka apapun pekerjaannya akan sulit terlaksana”.

1) Sikap ini dapat ditandai dengan empat hal, yaitu indikatornya diantaranya:

a. Kedisiplinan

Menurut Siswanto (2003) memandang bahwa disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

b. Tanggung jawab

Menurut Abdullah (2010) tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya.

c. Keberanian dalam Bersikap

Menurut Munawar (2007) keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Artinya, orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya.

d. Dukungan

Menurut Hendra Poerwanto (2006) dukungan adalah tingkat sejauh mana pimpinan memberi komunikasi dan arahan yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahan mereka. Pada prinsipnya, dukungan yang diberikan perusahaan kepada karyawan menunjukkan komitmen perusahaan kepada mereka. Dukungan tersebut dibalas oleh karyawan dalam bentuk komitmen karyawan terhadap organisasi. Lebih spesifik dukungan organisasi seperti promosi, peningkatan gaji, pelatihan yang diberikan, akan diinterpretasikan oleh para karyawan sebagai tanda respek dan perhatian perusahaan kepada karyawan.

e. **Inovasi dan Objektif**

Menurut Suwarno (2008) inovasi adalah ide, gagasan, praktek/objek benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seorang kelompok untuk diadopsi yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan.

Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Hasibuan, 2015). Adanya komitmen organisasi membuat sikap pegawai menunjukkan kepedulian dan kesetiaan yang tinggi pada organisasi.

g. **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto, 2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *database*,

jaringan (internet,intanet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson dalam Indriasari,2018).

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintah agar dapat berjalan dengan lancar.

1) Indikator dari Teknologi Informasi yaitu :

a. Sistem Manajemen Informasi

Menurut Danu Wira Pangestu (2007) Sistem Informasi Manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen didalam kegiatan yang merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian internal suatu instansi pemerintah maupun swasta yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur yang biasa digunakan untuk pemecahan suatu masalah.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Menurut Roger (2002) software atau perangkat lunak adalah suatu perintah program didalam sebuah komputer, yang apabila dieksekusi oleh usernya dapat memberikan fungsi dan juga unjuk kerja yang diinginkan oleh usernya. Dalam hal ini yaitu sistem yang digunakan didalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Ada enam komponen karakteristik perangkat lunak yaitu *functionaly* (kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi dalam kondisi tertentu),

usability (dapat digunakan dengan mudah), efficiency (efektif), maintainability (kemudahan pengembangan perangkat lunak untuk memperluas fungsinya, memperbaiki kinerjanya, atau kesalahannya).

c. Perangkat Keras (*Hardware*)

Menurut Dedi Gunawan (2007) perangkat keras komputer (*hardware*) secara umum yaitu komponen-komponen berbentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh serta membentuk satu kesatuan hingga menjadi bagian dari sebuah komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi/perintah dari *software*.

d. Pelatihan

Menurut Sumantri (2002:2) mendefinisikan pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tabel 1.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ririz Setiawati Kusuma (2013)	Analisis faktor-faktor Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember).	Hasil menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.
2	Idha Purwaningrum (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI	Hasil menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI. Sedangkan kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan

			SAP berbasis akrual.
3	Mohammad Man Azwan (2015)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.	Hasil menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis Akrual.
4	Anggi Rizkianci (2001)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Ada pengaruh positif terhadap Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual.

5	Norfaliza (2015)	Analisis faktor-faktor kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual.	Bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung (teknologi informasi) berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
6	I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
7	Ajeng Witantri (2012)	Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Kota Medan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi, dan perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Medan.

C. Kerangka Konseptual

a. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kesiapan penerapan SAP Akruwal

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah telah mengeluarkan PP No.71 Tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan diterapkan pada tahun 2015. Dalam rangka upaya kesiapan dan pencapaian tujuan tersebut maka Pemerintah harus dapat mempersiapkan diri dalam hal membenahi sumber daya manusianya dengan cara memberikan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan bimtek. Dengan begitu akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sehingga proses transisi menuju SAP Berbasis Akruwal bisa berjalan dengan lancar dan mulus serta juga akan dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akruwal dengan baik.

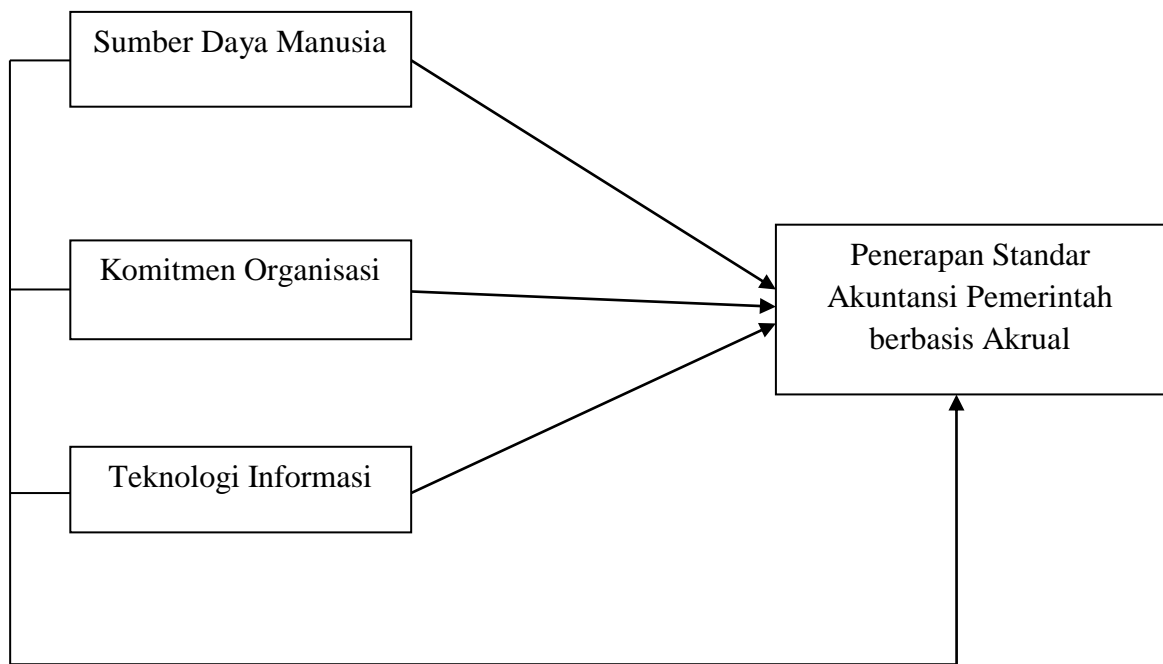
b. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akruwal

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu/kelompok untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu ataupun kelompok. Pegawai pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi akan bekerja dengan optimal dan maksimal karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi

dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintahan yang berkomitmen tinggi tentunya akan mematuhi setiap peraturan atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tempat mereka bekerja termasuk saat Pemerintah memutuskan akan menerapkan SAP Berbasis Akruwal setelah sebelumnya menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. Mereka dengan sepenuh hati akan mempelajari, memahami atau menghayati penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. Selain itu dengan adanya komitmen yang kuat, mereka juga akan bekerja dengan keras dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kinerja dan tercapainya tujuan organisasi. Dengan kuatnya komitmen yang dimiliki SKPD dan pegawai maka penerapan SAP Berbasis Akruwal akan berjalan lebih mudah.

c. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akruwal

Memasuki era modernisasi, pemerintah dan swasta mulai menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak berlebihan karena dengan penggunaan komputer, efektifitas dan efisiensi kerja mengalami peningkatan. Pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan juga sudah menggunakan berbagai aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan dan dengan adanya ini, maka diyakini akan mempermudah SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akruwal. Ketersediaan *hardware* dan *software* juga akan membuat penerapan SAP Berbasis Akruwal berjalan dengan sempurna karena didukung oleh perangkat pendukung yang layak dan memadai.



Gambar II.2
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2012:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Ada pengaruh Komitmen Organisasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Ada pengaruh Teknologi Informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
4. Ada pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Teknologi Informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif untuk menjelaskan tentang pengaruh ataupun hubungan faktor-faktor terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:5). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2013:4)

- a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Y)

Menurut Anggota IKAPI (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Dengan melihat indikator: kemauan dalam menyiapkan sarana ruangan, dukungan sarana perangkat lunak, dukungan sarana basis data pendukung, dukungan anggaran, dan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel-variabel bebas adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Instrumen dalam variabel ini di ambil dari penelitian Riris Setiawati Kusuma (2013). Indikator sumber daya manusia yang digunakan adalah memiliki integritas, kompetensi, loyalitas, reward, motivasi dan budaya organisasi. Variabel ini menggunakan 5 point skala likert.

b. Komitmen Organisasi (X2)

Komitmen merupakan janji, prinsip, atau rasa percaya diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam menjalankan tugas dan semangat kerja menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual. Instrumen dalam variabel ini adalah pertanyaan yang sebelumnya telah di gunakan pada penelitian terdahulu Riris Setiawati Kusuma (2013). Parameter Komitmen/Integritas meliputi indikator kesiapan komitmen untuk tugas, kedisiplinan dan tanggung jawab, keberanian dalam bersikap, dukungan dalam pelaksanaan, tanggung jawab moral, sikap komitmen dan integritas, prinsip, dan dukungan. Variabel ini di ukur dengan menggunakan 5 point skala likert.

c. Teknologi Informasi (X3)

Teknologi Informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Instrumen dalam variabel ini adalah pertanyaan yang sebelumnya telah di gunakan pada penelitian terdahulu Riris Setiawati Kusuma (2013). Indikator dalam variabel teknologi informasi adalah system manajemen informasi, perangkat lunak, pelatihan atau sistem pendampingan dalam operasi pelaksanaan perangkat lunak. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 point skala likert.

Tabel III.1

Alternatif Jawaban Responden

Jawaban	Nilai
Sangat Siap (SS)	5
Siap (S)	4
Cukup Siap (CS)	3
Tidak Siap (TS)	2
Sangat Tidak Siap (STS)	1

Tabel III.2

Kisi-Kisi Lembaran Kuisioner

No	Variabel	Indikator	Point
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dalam menyiapkan sarana ruangan 2. Dukungan sarana perangkat lunak 3. Dukungan sarana basis data pendukung, 4. Dukungan anggaran 5. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas 2. Kompetensi 3. Loyalitas 	1-6
2	Mansusia	<ol style="list-style-type: none"> 4. Rewards 5. Motivasi 6. Budaya Organisasi 	1-11
3	Komitmen Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan komitmen untuk tugas 2. Kedisiplinan dan tanggung jawab 3. Keberanian dalam bersikap 4. Dukungan dalam pelaksanaan 5. Inovasi dan obyektif 6. Sikap komitmen dan integritas 7. Prinsip 8. Dukungan 	1-11

7	SidangMejaHijau					
---	-----------------	--	--	--	--	--

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .

- a. Data Primer, menurut Jadongan Sijabat dalam (Skripsi Sofia Dora) yaitu merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang diperoleh adalah data yang belum diolah atau data hasil kuisioner yang diisi oleh responden, yang terlibat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebanyak 128 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tetentu yang akan diteliti. Dalam penentuan sample ini menggunakan metode Purpose Sampling yaitu metode pengumpulan

anggota sampel yang didasari dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Semua bagian pegawai anggaran, akuntansi dan keuangan.
- b. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- c. Kepala dan staf sub bagian akuntansi dan bagian keuangan.
- d. Pegawai bagian anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Kriteria pengambilan sampel adalah pegawai yang ada didalam setiap bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebanyak 68 responden, yaitu Bagian Keuangan, Bidang Anggaran, dan Bidang Akuntansi.

Tabel III.4
Jumlah Responden

No	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang
1	Bagian Keuangan	11
2	Bidang Anggaran	35
3	Bidang Akuntansi	22
	Jumlah	68

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Teknik Wawancara, menurut Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, teknik wawancara ini peneliti mengadakan wawancara tanya jawab kepada Bapak Arfan Anshari Rangkuti, SE Selaku Kassubid Pembukuan mengenai faktor kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.
2. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya Sugiono (2016:142). Penelitian ini dilakukan dengan membuat serangkaian pertanyaan terkait dengan faktor faktor kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data-data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*Reliability*) dan tingkat keabsahan (*Validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manavaliditas data diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Uji validitas dapat dilakukandengan menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan ataupun pernyataandengan skor total pengamatan (Arikunto, 2006:202). Jika nilai korelasi (*r*) yang diperleh positif, maka item yang akan diuji tersebut adalah valid. Dimana untuk hasil uji validitas pada variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.5
Hasil Uji Validitas Instrumen Sumber Daya Manusia (X₁)

No	Koefisien Korelasi	r tabel	Status
1	0,575	0,381	Valid
2	0,575	0,381	Valid
3	0,676	0,381	Valid
4	0,622	0,381	Valid
5	0,580	0,381	Valid
6	0,699	0,381	Valid
7	0,648	0,381	Valid
8	0,637	0,381	Valid

9	0,720	0,381	Valid
10	0,388	0,381	Valid
11	0,388	0,381	Valid

Sumber : Data Diolah

Tabel III.6

Hasil Uji Validitas Instrumen Komitmen Orgaisasi (X₂)

No	Koefisien Korelasi	r tabel	Status
1	0,575	0,381	Valid
2	0,575	0,381	Valid
3	0,676	0,381	Valid
4	0,622	0,381	Valid
5	0,580	0,381	Valid
6	0,699	0,381	Valid
7	0,648	0,381	Valid
8	0,637	0,381	Valid
9	0,720	0,381	Valid
10	0,388	0,381	Valid
11	0,388	0,381	Valid

Sumber : Data Diolah

Tabel III.7

Hasil Uji Validitas Instrumen Teknologi Informasi (X₃)

No	Koefisien Korelasi	r tabel	Status
1	0,667	0,381	Valid
2	0,790	0,381	Valid
3	0,624	0,381	Valid
4	0,723	0,381	Valid
5	0,806	0,381	Valid
6	0,522	0,381	Valid

Sumber : Data Diolah

Tabel III.8
Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual (Y)

No	Koefisien Korelasi	r tabel	Status
1	0,391	0,381	Valid
2	0,513	0,381	Valid
3	0,807	0,381	Valid
4	0,674	0,381	Valid
5	0,632	0,381	Valid
6	0,619	0,381	Valid

Sumber : Data Diolah

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih (Umar 2003:176). Reliabilitas dapat dikatakan menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan pengukuran makin *reliabel* alat pengukur begitu pula sebaliknya. Pengujian keandalan alat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas menggunakan metode alpha (α). Metode alpha yang digunakan adalah metode Cronbach. Menurut Yarnest (2003; 68) instrumen dapat dikatakan handal (*reliabel*) bila memiliki koefisien reliabilitas diatas 0,6

Tabel III.9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X₁,X₂,X₃ dan Y

Variabel	Nilai Reliabilitas	Status
Sumber Daya Manusia (X1)	0,746	Reliabel
Komitmen Organisasi (X2)	0,746	Reliabel

Teknologi Informasi (X3)	0,772	Reliabel
Penerapan SAP Berbasis Akrua (Y)	0,731	Reliabel

Sumber : Data Diolah

2. Uji Asumsi Klasik

Sebagai konsekuensi pengguna analisis statistik parametik, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menguji bahwa tidak terdapat bias pada nilai estimator dari model yang digunakan dalam penelitian (Sangadji dan Sopiah 2010:249). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Erlina (2011:101) dalam buku Metodologi Penelitian, uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemeliharaan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametik, dan jika tidak normal, gunakan statistik nonparametik atau lakukan *treatment* agar data normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Elrina (2011:103) dalam buku Metodologi Penelitian, Multikolonieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Erlina (2011:106), Salah satu asumsi yang penting dari model regresi linear adalah variabel residual bersifat homokedastisitas atau bersifat konstan. Umumnya heterokedastisitas sering terjadi pada model yang menggunakan data silang waktu (*cross section*) daripada data runtut waktu (*time*

series). Hal ini bukan berarti model yang menggunakan data runtut waktu bebas dari heterokedastisitas.

3. Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda ini bertujuan memprediksi besarnya keterkaitan dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana: Y = Penerapan SAP berbasis Akruar

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Sumber Daya Manusia

X_2 = Komitmen Organisasi

X_3 = Teknologi Informasi

e = Error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tetapi, karena R^2 mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap jumlah variabel independen

yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang digunakan adalah adjusted R^2 berkisar antara nol dan satu.

Nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Nilai adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat digunakan tingkat signifikan 5%.

c. Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghazali (2005:84), dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan $<0,05$ maka H_0 ditolak, namun jika nilai signifikan $>0,05$ maka H_0 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 11 pertanyaan untuk variabel X1 (Sumber Daya manusia), 11 pertanyaan untuk variabel X2 (Komitmen Organisasi), 6 Pertanyaan untuk variabel X3 (Teknologi Informasi), dan 6 pertanyaan untuk variabel Y (Penerapan SAP Akrua) dimana yang menjadi variabel X1 adalah sumber daya manusia, variabel X2 adalah teknologi informasi, variabel X3 adalah teknologi informasi, dan yang menjadi variabel Y adalah Penerapan SAP Akrua. Angket yang disebar ini diberikan kepada pegawai sebagai sample yang berjumlah 30 orang dan dengan menggunakan metode Likert Summated Rating (LSR).

Tabel IV.1

Skala Likert

PERNYATAAN	BOBOT
-Sangat Siap	5
-Siap	4
-Cukup Siap	3
-Tidak Siap	2
-Sangat Tidak Siap	1

Pada bab sebelumnya, penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah keseluruhan kuisisioner (68 buah) yang telah saya sebarkan pada masing-masing unit kerja dan telah mendapatkan balasannya.

Tabel IV.2

Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner

Kuesioner yang disebar	68	100%
Kuesioner yang kembali	68	100%
Kuesioner valid yang diolah	68	100%

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.2 menunjukkan penyebaran dan tingkat pengembalian dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 68 kuesioner, yang kemudian dari jumlah 68 kuisisioner yang disebar, kembali sebanyak 68 kuisisioner atau 100%. Berdasarkan 100% kuisisioner yang kembali semuanya dianggap memenuhi syarat.

a. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebanyak 68 orang, yang terdiri dari beberapa karakteristik, baik usia, jenis kelamin, masa kerja maupun tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai. Dari kuesioner yang disebarkan diperoleh data pegawai sebagai berikut :

Tabel IV.3
Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	27	39,7	39,7	39,7
	Perempuan	41	60,3	60,3	60,3
	Total	68	100	100	100

Sumber Data Penelitian SPSS,2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik jenis kelamin, mayoritas responden berjenis perempuan sebesar 41 orang (60,3%) dan jenis kelamin laki-laki 27 orang (39,7%).

Tabel IV.4
Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22-30 tahun	34	50	50	50
	31-40 tahun	11	16,2	16,2	16,2
	>40 tahun	23	33,8	33,8	33,8
	Total	68	100	100	100

Sumber Data Penelitian SPSS,2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya responden pada kelompok usia 22-30 tahun adalah 34 orang atau (50%), usia 31-40 tahun adalah 11 orang atau (16,2%), usia >40 tahun adalah 23 orang atau (33,8%).

Tabel IV.5

Masa Kerja Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5tahun	33	48,5	48,5	48,5
6-10tahun	19	28	28	28
>10 tahun	16	23,5	23,5	23,5
Total	68	100	100	100

Sumber Data Penelitian SPSS,2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya masa kerja responden pada kelompok masa kerja 1-5 tahun adalah 33 orang atau (48,5%), masa kerja 6-10 tahun adalah 19 orang atau (28%), dan masa kerja >10 tahun adalah 16 orang atau (23,5%).

Tabel IV.6

Tingkat Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	20	29,4	29,4	29,4
D3	4	6	6	6
S1 Akt	22	32,3	32,3	32,3
S1 Non Akt	16	23,5	23,5	23,5
S2	6	8,8	8,8	8,8
Total	68	100	100	100

Sumber Data Penelitian SPSS,2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya tingkat pendidikan responden pada kelompok SMA adalah 20 orang atau (29,4), D3 adalah 4 orang

atau (6%), S1 akt adalah 22 orang atau (32,3%), S1 Non akt adalah 16 orang (23,5) dan S2 adalah 6 orang atau (8,8%).

b. Analisa Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban responden dari angket yang penulis sebarakan yaitu :

Tabel IV.7
Skor Angket untuk Variabel X1(SDM)

Pernyataan	Jawaban											
	Sangat Siap		Siap		Cukup Siap		Tidak Siap		Sangat Tidak Siap		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Anda memiliki integritas	33	48,5	35	51,5	0	0	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki rasa kepuasan	32	47	35	51,5	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda membutuhkan perhatian	33	48,5	37	54,4	0	0	0	0	0	0	68	100
Anda membutuhkan dukungan	35	51,5	32	47	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki alasan	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100
Anda mmbutuhkan dorongan	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100
Anda membutuhkan ruangan kerja	30	44,1	31	45,6	7	10,3	0	0	0	0	68	100

Anda memiliki kemauan bekerja	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100
Anda membutuhkan promosi	30	44,1	31	45,6	7	10,3	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki loyalitas	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki kemampuan	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100

Sumber : Data Diolah,2016

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sebagian besar menjawab Sangat Siap sebesar 51,5%.
- Sebagian besar menjawab Siap Sebesar 54,4%.
- Sebagian besar menjawab Cukup Siap sebesar 32,4%.

Tabel IV.8

Skor Angket untuk Variabel X2 (Komitmen Organisasi)

No Pernyataan	Jawaban											
	Sangat Siap		Siap		Cukup Siap		Tidak Siap		Sangat Tidak Siap		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Anda memiliki komitmen	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki kedisiplinan	35	51,5	33	48,5	0	0	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki keberanian	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100

Anda memiliki dukungan	20	29,4	36	52,9	12	17,7	0	0	0	0	68	100
Anda bertanggung jawab moral	32	47,1	35	51,5	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda memiliki inovasi dan obyektif	21	30,9	36	52,9	11	16,2	0	0	0	0	68	100
Anda mempunyai sikap komitmen	32	47,1	35	51,5	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda mempunyai prinsip	26	38,2	41	60,3	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda mempunyai keinginan	33	48,5	34	50	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda mempunyai strategi	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100
Anda mempunyai motivasi	17	25	29	42,7	22	32,4	0	0	0	0	68	100

Sumber : Data Diolah,2016

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebagian besar menjawab Sangat Siap sebesar 51,5%
- b. Sebagian besar menjawab Siap sebesar 60,3%.
- c. Sebagian besar menjawab Cukup Siap sebesar 32,4%.

Tabel IV.9

Skor Angket untuk Variabel X3 (Teknologi Informasi)

No Pernyataan	Jawaban											
	Sangat Siap		Siap		Cukup Siap		Tidak Siap		Sangat Tidak Siap		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Anda mempunyai platform	31	45,6	36	52,9	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda didukung oleh sistem mekanisme	23	33,8	44	64,7	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Anda didukung sistem manajemen	27	39,7	30	44,1	11	16,2	0	0	0	0	68	100
Anda didukung sistem perangkat lunak	33	48,5	33	48,5	2	3	0	0	0	0	68	100
Anda didukung pelatihan	36	52,9	32	47,1	0	0	0	0	0	0	68	100
Anda memperoleh pendampingan	23	33,8	32	47,1	13	19,1	0	0	0	0	68	100

Sumber : Data Diolah, 2016

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebagian besar menjawab Sangat Siap sebesar 52,9%
- b. Sebagian besar menjawab Siap sebesar 64,7%.
- c. Sebagian besar menjawab Cukup Siap sebesar 19,1%.

Tabel IV.10

Skor Angket untuk Variabel Y (Penerapan SAP AkruaI)

No Pernyataan	Jawaban											
	Sangat Siap		Siap		Cukup Siap		Tidak Siap		Sangat Tidak Siap		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pemerintah mempunyai kemauan menyiapkan sarana ruangan	31	45,6	36	52,9	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Pemerintah mempunyai dukungan perangkat lunak	23	33,8	44	64,7	1	1,5	0	0	0	0	68	100
Pemerintah mempunyai dukungan basis data	27	39,7	30	44,1	11	16,2	0	0	0	0	68	100
Pemerintah mempunyai dukungan administrasi	33	48,5	33	48,5	2	3	0	0	0	0	68	100
Pemerintah mempunyai dukungan perangkat lunak	36	52,9	32	47,1	0	0	0	0	0	0	68	100
Pemerintah mempunyai dukungan SDM yang memadai	23	33,8	32	47,1	13	19,1	0	0	0	0	68	100

Sumber : Data Diolah,2016

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebagian besar menjawab Sangat Siap sebesar 52,9%
- b. Sebagian besar menjawab Siap sebesar 64,7%.
- c. Sebagian besar menjawab Cukup Siap sebesar 19,1%.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah regresi merupakan model yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yakni:

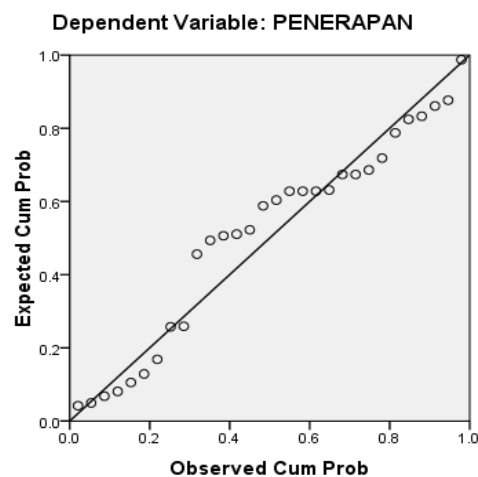
a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi normalitas.

Gambar IV.1

Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar diatas mengidentifikasi bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian cenderung normal.

b. Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (Variance Inflasi Factor/VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel IV.11
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.202	5.005		.440	.004		
SDM	.597	.098	1.062	6.083	.000	.297	3.365
KOMITMEN	.080	.059	.142	1.340	.002	.809	1.235
TEKNOLOGI	.157	.158	.172	.995	.009	.303	3.297

a. Dependent Variable: PENERAPAN

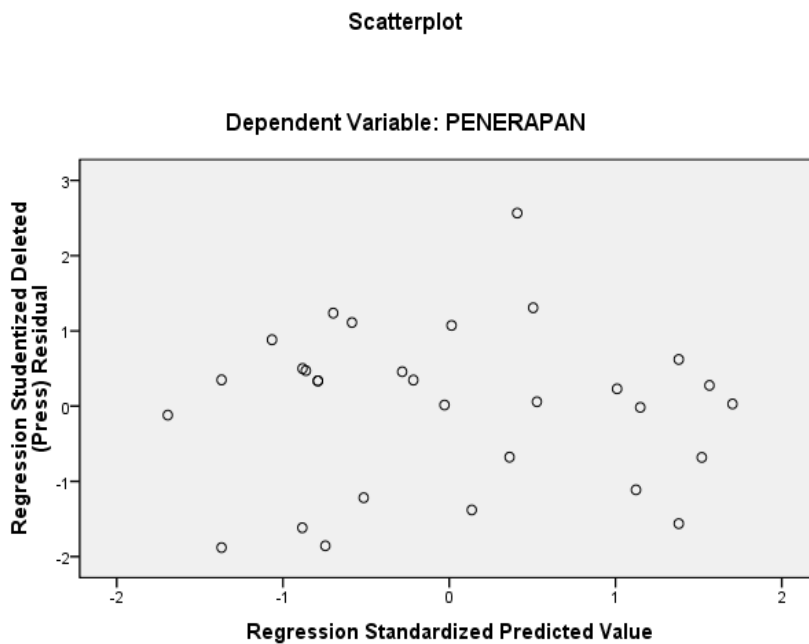
Kedua variabel independen yakni X1 dan X2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), sehingga tidak menjadi multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini.

c. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar IV.2
Heterokedastisitas



Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas / teratur, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas” pada model regresi.

3. Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi berganda dapat dilihat dari nilai koefisien B pada tabel berikut ini :

Tabel IV.12
Koefisien Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.202	5.005		440	.004		
SDM	.597	.098	1.062	6.083	.000	.297	3.365
KOMITMEN	.080	.059	.142	1.340	.002	.809	1.235
TEKNOLOGI	.157	.158	.172	.995	.009	.303	3.297

a. Dependent Variable: PENERAPAN

Dari perhitungan dengan menggunakan program komputer dengan menggunakan SPSS (*Statistical Program For Social Schedule*) versi 16.0 didapat:

$$a = 2.202$$

$$b_1 = 0,597$$

$$b_2 = 0,080$$

$$b_3 = 0,157$$

Berdasarkan tabel IV.12 diatas diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 2.202 + 0,597 X_1 + 0,080 X_2 + 0,157 X_3$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas (sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi) memiliki koefisien bi yang positif, berarti seluruh variabel bebas mempunyai hubungan yang searah terhadap variabel Y (penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual).

4. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil pengujian dengan uji t sebagai berikut :

Tabel IV.13
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.202	5.005		.440	.004		
	SDM	.597	.098	1.062	6.083	.000	.297	3.365
	KOMITMEN	.080	.059	.142	1.340	.002	.809	1.235
	TEKNOLOGI	.157	.158	.172	.995	.009	.303	3.297

a. Dependent Variable: PENERAPAN

Dari tabel IV.13 dapat dilihat hasil uji statistik secara parsial sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia (X_1) diperoleh t_{hitung} sebesar 6,083 dengan nilai signifikan 0,000 sedangkan nilai ketentuan untuk 68 sampel t_{tabel} sebesar 1,996 dengan nilai signifikan 0,05. Kesimpulannya t_{hitung} (6,083) > t_{tabel} (1,996) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- b. Komitmen Organisasi (X_2) diperoleh t_{hitung} sebesar 1,340 dengan nilai signifikan 0,002 sedangkan nilai ketentuan untuk 68 sampel t_{tabel} sebesar 1,996 dengan nilai signifikan 0,05. Kesimpulannya t_{hitung} (1,340) < t_{tabel} (1,996) dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial komitmen organisasi (X_2) memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- c. Teknologi Informasi (X_3) diperoleh t_{hitung} sebesar 0,995 dengan nilai signifikan 0,009 sedangkan nilai ketentuan untuk 68 sampel t_{tabel} sebesar 1,996 dengan nilai signifikan 0,05. Kesimpulannya t_{hitung} (0,995) < t_{tabel} (1,996) dengan nilai signifikan 0,009 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial teknologi informasi (X_3) memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

5. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengkaji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini

adalah : sumber daya manusia (X_1), komitmen organisasi (X_2), dan teknologi informasi (X_3) berpengaruh terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y). Agar dapat dilakukan pengujian statistik, maka hipotesis tersebut di konversi ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut :

Berikut ini hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut

:

Tabel IV.14

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.370	3	28.790	28.145	.000 ^a
	Residual	26.596	26	1.023		
	Total	112.967	29			

a. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, KOMITMEN, SDM

b. Dependent Variable: PENERAPAN

Pada tabel IV.14 Uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 28.145 dengan nilai signifikan 0,000 dengan 68 sampel dengan signifikan 0,05 dengan nilai F_{tabel} sebesar 3,14 maka diperoleh $F_{hitung} (28,145) > F_{tabel} (3,14)$ dengan nilai signifikan 0,000 dibawah nilai 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia (X_1), komitmen organisasi (X_2), teknologi informasi (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah angka yang menunjukkan besarnya derajat atau kemampuan distribusi variabel independen (X) dalam menjelaskan dan menerangkan variabel dependen (Y). Semakin besar koefisien determinasi adalah nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Berikut ini nilai koefisien determinasi (R^2) :

Tabel IV.15

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.765	.737	1.01140

a. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI (X3), KOMITMEN(X2), SDM (X1)

b. Dependent Variable: PENERAPAN (Y)

Berdasarkan tabel IV.15 diatas dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0,765 atau 76,5% yang berarti bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) dengan sumber daya manusia (X_1), komitmen organisasi (X_2) dan teknologi informasi (X_3) memiliki pengaruh sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

2 Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial (individu) ketiga variabel berpengaruh terhadap variabel terikat. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Dari hasil uji statistik sumber daya manusia (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dikarenakan hasil $t_{hitung} (6,083) > t_{tabel}(1,996)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan nilai *R-Square* sebesar 0,765 atau 76,5% yang berarti bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua (Y) dengan sumber daya manusia (X_1), komitmen organisasi (X_2) dan teknologi informasi (X_3) memiliki pengaruh sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Dari hasil uji statistik komitmen organisasi (X_2) berpengaruh negatif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dikarenakan hasil $t_{hitung} (1,340) < t_{tabel}(1,996)$ dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan nilai *R-Square* sebesar 0,765 atau 76,5% yang berarti bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) dengan sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2) dan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini

3. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Dari hasil uji statistik teknologi informasi (X₃) berpengaruh negatif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dikarenakan hasil t_{hitung} (0,995) > t_{tabel} (1,996) dengan nilai signifikan 0,009 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Dengan nilai *R-Square* sebesar 0,765 atau 76,5% yang berarti bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) dengan sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2) dan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini

4. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (X₁), Komitmen Organisasi (X₂) dan Teknologi Informasi (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Medan. Dikarenakan hasil $F_{hitung} (28,145) > F_{tabel} (3,14)$ dengan nilai signifikan 0,000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan nilai *R-Square* sebesar 0,765 atau 76,5% yang berarti bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) dengan sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2) dan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

3 Pembahasan

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Dari data diperoleh dilihat hasil $t_{hitung} (6,083) > t_{tabel} (1,996)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, ini berarti apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga proses penerapan SAP Berbasis Akrual bisa berjalan dengan lancar serta juga memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai, dimana dari hasil kuesioner diperoleh tingkat pendidikan S1 Akuntansi dari ketiga bagian diperoleh 32,3% apabila ditingkatkan maka akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akrual, dan penerapan SAP Berbasis Akrual akan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Halim (2012) yang menyatakan bahwa dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Norfaliza (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Dari data diperoleh hasil $t_{hitung} (1,340) < t_{tabel} (1,996)$ dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut maka terdapat keputusan yaitu komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Pegawai pemerintahan yang berkomitmen tinggi tentunya akan mematuhi setiap peraturan atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tempat mereka bekerja termasuk saat Pemerintah memutuskan akan menerapkan SAP Berbasis Akrual setelah sebelumnya menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Mereka dengan sepenuh hati akan mempelajari, memahami atau menghayati penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. Selain itu dengan adanya komitmen yang kuat, mereka juga akan bekerja dengan keras dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kinerja dan tercapainya tujuan

organisasi. Dengan kuatnya komitmen yang dimiliki BPKAD dan pegawai maka penerapan SAP Berbasis AkruaI akan berjalan lebih mudah

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Sulani (2010) yang menyatakan komitmen dari anggota organisasi akan mempercepat keberhasilan penerapan peraturan tersebut, selain itu dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idha Purwaningrum (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI

3. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI

Dari data diperoleh hasil $t_{hitung} (0,995) < t_{tabel} (1,996)$ dengan nilai signifikan $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut maka terdapat keputusan yaitu teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Hal ini berarti jika penerapan SAP Berbasis AkruaI didukung oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai maka penerapan SAP berbasis AkruaI dapat berjalan dengan baik dan akan mempermudah BPKAD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis AkruaI. Ketersediaan *hardware* dan *software* juga akan membuat penerapan SAP Berbasis AkruaI berjalan dengan sempurna karena didukung oleh perangkat pen-dukung yang layak dan memadai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Kenneth dan Jane (2005) bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif maka diperlukan sarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Norfaliza (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh yang disignifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (X_1), Komitmen Organisasi (X_2) dan Teknologi Informasi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan membutuhkan komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai, serta membutuhkan dukungan teknologi informasi dalam memudahkan penyelesaian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Dikarenakan hasil F_{hitung} (28,145) > F_{tabel} (3,14) dengan nilai signifikan 0,000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan nilai *R-Square* sebesar 0,765 atau 76,5% yang berarti bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) dengan sumber daya manusia (X_1), komitmen

organisasi (X2) dan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan variabel sumber daya manusia (X_1) terhadap variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel komitmen organisasi (X_2) terhadap variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel teknologi informasi (X_3) terhadap variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
4. Dari Uji F_{hitung} adalah 28,145 dengan probabilitas sig 0,000 $< \alpha 0,05$ menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti sumber daya manusia (X_1), komitmen organisasi (X_2) dan teknologi informasi (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAP berbasis AkruaI (Y).

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Saran Praktis

- a. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan hendaknya melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah, sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

2. Saran Teoritis

- a. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat menjadi pedoman/acuan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kontribusi dari sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan melihat korelasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Rigel Hullah, dkk. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT*, 3(2)
- Anggi Rizkianci. (2001). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi.
- Azhar, 2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri 13 (Studi pada pemerintah Kota Langsa)*. Tesis.
- Fakhrurazi.(2010).Standar Akuntansi Pemerintahan
<http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>.
- Gabriella Adventana. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah DIY dalam implementasi SAP berbasis Akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010. Skripsi.
- Hasibuan, Dini Rahmi, Iskandar Muda. 2013 “Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kota Medan). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Skripsi
- Hetty Herlina. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam ImplementasiPP 71 Tahun 2010.(Studi Empiris : Kabupaten Nias Selatan). Skripsi.
- I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra. 2015. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2006). *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Jakarta. (<http://www.ksap.org/memorandum.pdf>). 2 Desember 2012.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda. Jakarta, 25 Maret.
- Kristyono, Joko. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai PP 71 / 2010 (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2012/2013). *Jurnal Akuntansi Fakulats Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*
- Mohammad Man Azwan. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah Analisis Deskriptif.

- Norfaliza. 2015. Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal.
- Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi 2017. Akuntansi Pemerintahan Penerbit IN MEDIA.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010), *Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis AkruaI)*
- Peraturan Walikota Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Medan, 2016. Pemerintah Kota Medan.
- Purwaningrum, Idha. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupeten Boyolali). Skripsi.
- Sofia Dora. 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan). Skripsi.
- Witantri, Ajeng. 2012. Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Medan.Skripsi.
- Yogantara, Komang Krishna. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Pada Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada BPR di Bali). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*

	Sig. (2-tailed)	.086	.086	.000	.508	.000	.167		.153
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
s8	Pearson Correlation	.355	.355	.200	.202	.141	.484**	.267	.1
	Sig. (2-tailed)	.054	.054	.289	.285	.456	.007	.153	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
s9	Pearson Correlation	.360	.360	.349	.407*	.329	.595**	.435*	.697**
	Sig. (2-tailed)	.051	.051	.059	.026	.076	.001	.016	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
s10	Pearson Correlation	-.229	-.229	.067	.186	.381*	.312	.126	.202
	Sig. (2-tailed)	.225	.225	.724	.326	.038	.094	.508	.285
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
s11	Pearson Correlation	-.229	-.229	.067	.186	.381*	.312	.126	.202
	Sig. (2-tailed)	.225	.225	.724	.326	.038	.094	.508	.285
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
SDM	Pearson Correlation	.575**	.575**	.676**	.622**	.580**	.699**	.648**	.637**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN.2 HASIL UJI VALIDITAS KOMITMEN ORGANISASI (X2)

Correlations

	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10
on Correlation	1	1.000**	.456*	.283	-.143	.109	.318	.355	.360	-.229
2-tailed)		.000	.011	.130	.450	.567	.086	.054	.051	.225
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	1.000**	1	.456*	.283	-.143	.109	.318	.355	.360	-.229
2-tailed)	.000		.011	.130	.450	.567	.086	.054	.051	.225
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.456*	.456*	1	.336	.566**	.208	.668**	.200	.349	.067
2-tailed)	.011	.011		.069	.001	.271	.000	.289	.059	.724
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.283	.283	.336	1	.381*	.731**	.126	.202	.407*	.186
2-tailed)	.130	.130	.069		.038	.000	.508	.285	.026	.326
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	-.143	-.143	.566**	.381*	1	.636**	.614**	.141	.329	.381*
2-tailed)	.450	.450	.001	.038		.000	.000	.456	.076	.038
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.109	.109	.208	.731**	.636**	1	.259	.484**	.595**	.312
2-tailed)	.567	.567	.271	.000	.000		.167	.007	.001	.094
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.318	.318	.668**	.126	.614**	.259	1	.267	.435*	.126
2-tailed)	.086	.086	.000	.508	.000	.167		.153	.016	.508

	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.355	.355	.200	.202	.141	.484**	.267	1	.697**	.202	
(2-tailed)	.054	.054	.289	.285	.456	.007	.153		.000	.285	
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.360	.360	.349	.407*	.329	.595**	.435*	.697**	1	.055	
(2-tailed)	.051	.051	.059	.026	.076	.001	.016	.000		.774	
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	-.229	-.229	.067	.186	.381*	.312	.126	.202	.055	1	
(2-tailed)	.225	.225	.724	.326	.038	.094	.508	.285	.774		
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	-.229	-.229	.067	.186	.381*	.312	.126	.202	.055	1.000**	
(2-tailed)	.225	.225	.724	.326	.038	.094	.508	.285	.774	.000	
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
on Correlation	.575**	.575**	.676**	.622**	.580**	.699**	.648**	.637**	.720**	.388*	
(2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.034	
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

Significant at the 0.01 level (2-tailed).

Significant at the 0.05 level (2-tailed).

N	68	68	68	68	68	68	68
---	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**LAMPIRAN 4. HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL Y (PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL)**

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	Penerapan
p1	Pearson Correlation	1	-.022	.338	-.107	.102	-.170	.391 [*]
	Sig. (2-tailed)		.908	.068	.573	.590	.368	.033
	N	68	68	68	68	68	68	68
p2	Pearson Correlation	-.022	1	.456 [*]	.283	-.143	.109	.513 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.908		.011	.130	.450	.567	.004
	N	68	68	68	68	68	68	68
p3	Pearson Correlation	.338	.456 [*]	1	.336	.566 ^{**}	.208	.807 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.068	.011		.069	.001	.271	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
p4	Pearson Correlation	-.107	.283	.336	1	.381 [*]	.731 ^{**}	.674 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.573	.130	.069		.038	.000	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
p5	Pearson Correlation	.102	-.143	.566 ^{**}	.381 [*]	1	.636 ^{**}	.632 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.590	.450	.001	.038		.000	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
p6	Pearson Correlation	-.170	.109	.208	.731 ^{**}	.636 ^{**}	1	.619 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.368	.567	.271	.000	.000		.000
	N	68	68	68	68	68	68	68

Penerapan	Pearson Correlation	.391*	.513**	.807**	.674**	.632**	.619**	1
	Sig. (2-tailed)	.033	.004	.000	.000	.000	.000	
	N	68	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	2.202	5.005		440	.004	12.490	
	SDM	.597	.098	1.062	6.083	.000	.395	
	KOMITMEN	.080	.059	.142	1.340	.002	.043	
	TEKNOLOGI	.157	.158	.172	.995	.009	.482	

a. Dependent Variable: PENERAPAN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.874 ^a	.765	.737	1.01140
---	-------------------	------	------	---------

a. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, KOMITMEN, SDM

b. Dependent Variable: PENERAPAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.202	5.005		440	.004		
	SDM	.597	.098	1.062	6.083	.000	.297	3.365
	KOMITMEN	.080	.059	.142	1.340	.002	.809	1.235
	TEKNOLOGI	.157	.158	.172	.995	.009	.303	3.297

a. Dependent Variable: PENERAPAN

LAMPIRAN 5. HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL X1 (SUMBER DAYA MANUSIA)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	68	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	68	100.0

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	68	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	68	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	12

LAMPIRAN 7. HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL X3 TEKNOLOGI INFORMASI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	68	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	68	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	7

**LAMPIRAN 8. HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL Y PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	68	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	68	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	7

LAMPIRAN 9 REGRESI LINIER X1,X2,X3,Y

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PENERAPAN	27.0333	1.97368	30
SDM	49.5333	3.51090	30
KOMITMEN	49.5333	3.51090	30
TEKNOLOGI	27.2000	2.15599	30

Correlations

		PENERAPAN	SDM	KOMITMEN	TEKNOLOGI
Pearson Correlation	PENERAPAN	1.000	.858	-.242	.655
	SDM	.858	1.000	-.427	.833
	KOMITMEN	-.242	-.427	1.000	-.406
	TEKNOLOGI	.655	.833	-.406	1.000
Sig. (1-tailed)	PENERAPAN	.	.000	.099	.000
	SDM	.000	.	.009	.000
	KOMITMEN	.099	.009	.	.013
	TEKNOLOGI	.000	.000	.013	.
N	PENERAPAN	30	30	30	30
	SDM	30	30	30	30

KOMITMEN	30	30	30	30
TEKNOLOGI	30	30	30	30

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TEKNOLOGI, KOMITMEN, SDM ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENERAPAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.370	3	28.790	28.145	.000 ^a
	Residual	26.596	26	1.023		

Total	112.967	29		
-------	---------	----	--	--

a. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, KOMITMEN, SDM

b. Dependent Variable: PENERAPAN

Coefficient Correlations^a

Model			TEKNOLOGI	KOMITMEN	SDM
1	Correlations	TEKNOLOGI	1.000	.102	-.798
		KOMITMEN	.102	1.000	.175
		SDM	-.798	.175	1.000
	Covariances	TEKNOLOGI	.025	.001	-.012
		KOMITMEN	.001	.004	.001
		SDM	-.012	.001	.010

a. Dependent Variable: PENERAPAN

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions
-------	---------	------------	-----------------	----------------------

on			(Constant)	SDM	KOMITMEN	TEKNOLOGI
1	1	3.988	1.000	.00	.00	.00
	2	.010	20.234	.00	.03	.22
	3	.001	60.304	.59	.09	.54
	4	.001	69.696	.41	.89	.24

a. Dependent Variable: PENERAPAN

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24.1117	29.9729	27.0333	1.72577	30
Std. Predicted Value	-1.693	1.703	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.232	.548	.361	.080	30
Adjusted Predicted Value	24.1357	29.9674	27.0216	1.74529	30
Residual	-1.74710	2.26152	.00000	.95766	30
Std. Residual	-1.727	2.236	.000	.947	30
Stud. Residual	-1.794	2.328	.005	1.018	30
Deleted Residual	-1.97218	2.45122	.01177	1.11107	30
Stud. Deleted Residual	-1.879	2.566	.003	1.054	30
Mahal. Distance	.562	7.554	2.900	1.751	30
Cook's Distance	.000	.173	.041	.050	30
Centered Leverage Value	.019	.260	.100	.060	30

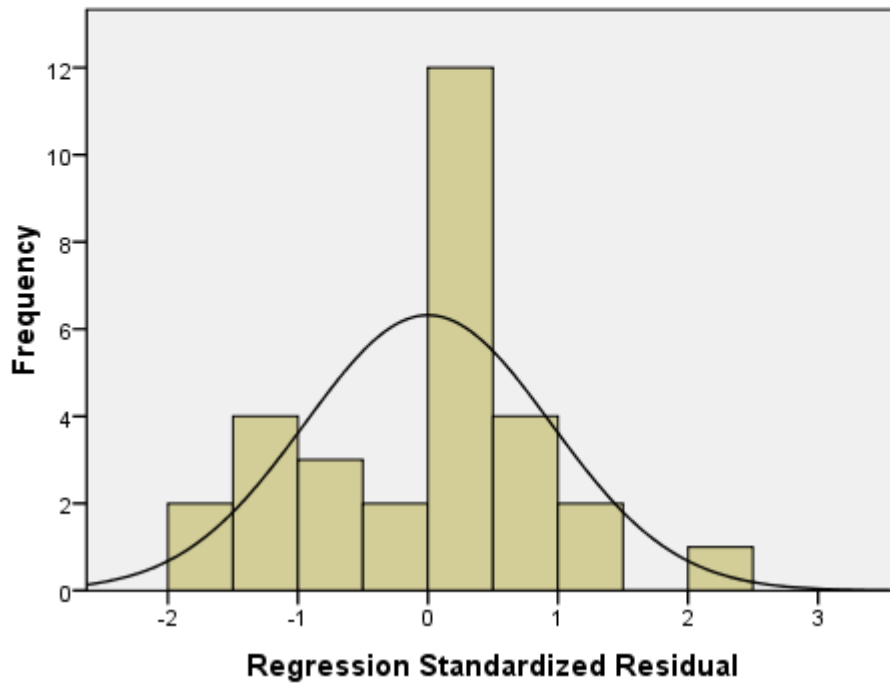
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24.1117	29.9729	27.0333	1.72577	30
Std. Predicted Value	-1.693	1.703	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.232	.548	.361	.080	30
Adjusted Predicted Value	24.1357	29.9674	27.0216	1.74529	30
Residual	-1.74710	2.26152	.00000	.95766	30
Std. Residual	-1.727	2.236	.000	.947	30
Stud. Residual	-1.794	2.328	.005	1.018	30
Deleted Residual	-1.97218	2.45122	.01177	1.11107	30
Stud. Deleted Residual	-1.879	2.566	.003	1.054	30
Mahal. Distance	.562	7.554	2.900	1.751	30
Cook's Distance	.000	.173	.041	.050	30
Centered Leverage Value	.019	.260	.100	.060	30

a. Dependent Variable: PENERAPAN

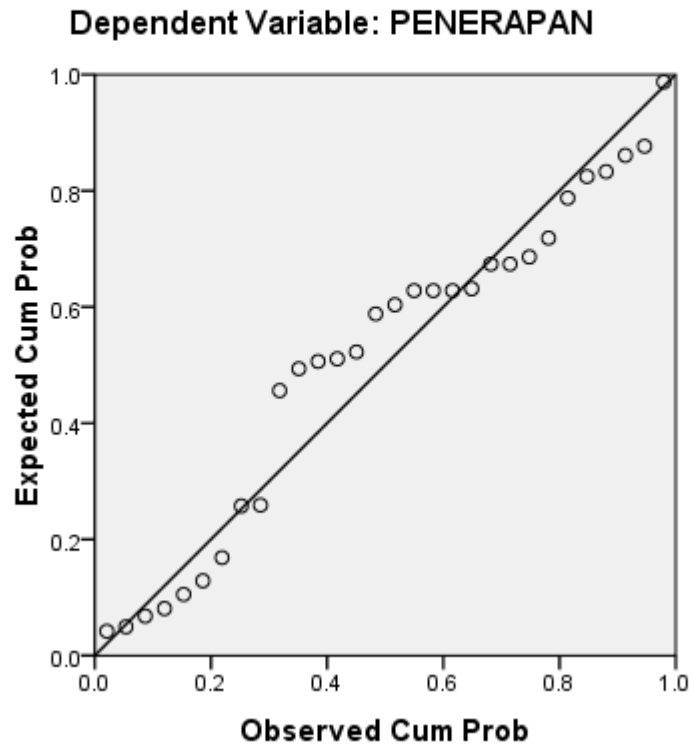
Histogram

Dependent Variable: PENERAPAN



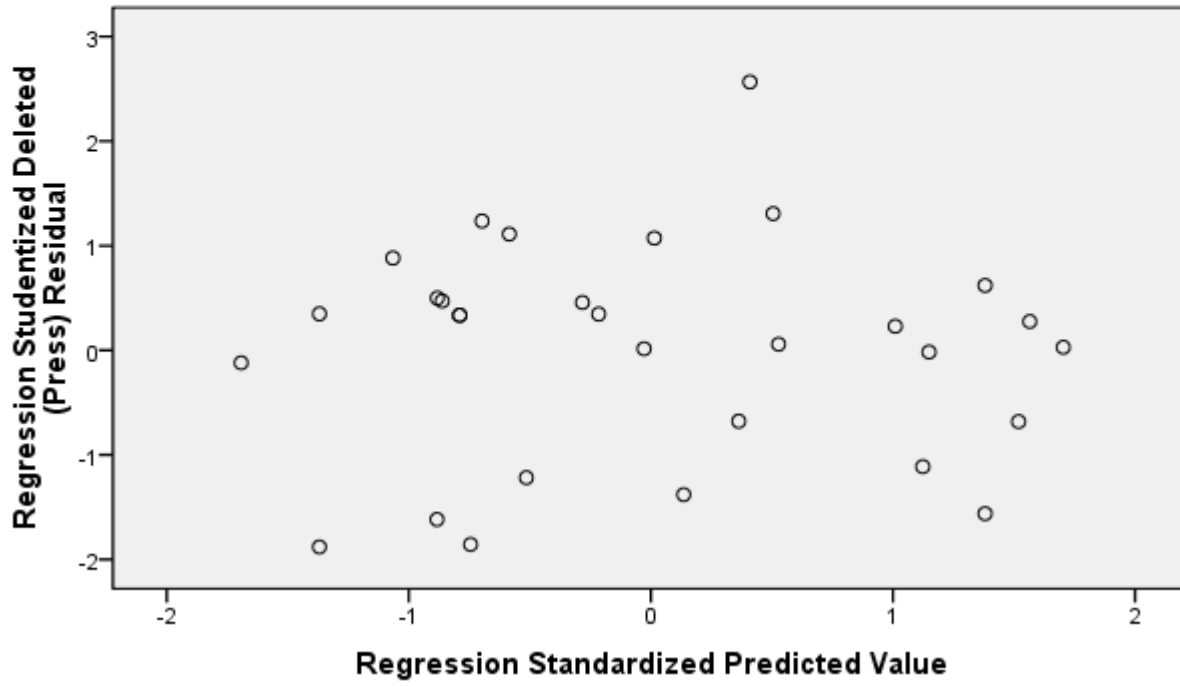
Mean = -3.75E-15
Std. Dev. = 0.947
N = 30

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: PENERAPAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Anggita Sari Lubis
Alamat/ Kode Pos : Jl. Gunung Martimbang No. 08 Medan 20238
HP : 082165217122
Email : anggitasarilubis.03@gmail.com
Tempat/ TanggalLahir : Medan, 03-April-1996
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi/ BeratBadan : 155 / 50kg
JenisKelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. Tahun 2002-2008, Tamat SD Negeri 060878 Medan
2. Tahun 2008-2011, Tamat SMP SINAR HUSNI
3. Tahun 2011-2014, Tamat SMA SINAR HUSNI
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Maret 2018

Anggita Sari Lubis